

Peran Islam dalam Pembangunan Masyarakat Kota Ambon, Provinsi Maluku

Ilham Syafii¹, NDR. Ayu Nurdiana²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Article history:

Received : 05-05-2023

Accepted : 29-05-2023

Published : 06-07-2023

Abstract

The city of Ambon, as the capital of Maluku Province, has diverse cultures and religions, including Islam. However, despite the majority of the population being Muslim, there has been limited research on the roles of Islam in Ambon. This study aims to analyze the role of Islam in community development in Ambon, Maluku Province, using a qualitative approach with a case study method. Data was obtained from in-depth analysis of the field and interviews with Islamic community leaders, government officials, and Islamic institutions' administrators in Ambon. In addition, data was collected from relevant documents and archives for the study. The results showed that Islam plays a significant role in community development in Ambon, especially in education and economic empowerment. Islamic educational institutions such as madrasah and pesantren have contributed to improving human resources quality in Ambon. Furthermore, Islam also contributes to infrastructure development and public facilities. Islamic institutions such as social and charitable foundations are active in providing social and humanitarian services to the people of Ambon, especially in emergency situations and natural disasters. However, there are still obstacles in implementing the role of Islam in community development in Ambon. One of them is the lack of coordination and synergy between the government and Islamic institutions in implementing development programs. Additionally, there are still differences in views and understandings among those involved in community development in Ambon. Therefore, efforts are needed to improve coordination and synergy between the government and Islamic institutions in development programs in Ambon.

Keywords: *Islam; Community Development, Ambon, Maluku.*

Author's email:
ilhamsyafii1999@gmail.com

Pendahuluan

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai kondisi peningkatan produktivitas melalui pendapatan perkapita. Pemerintah dan bangsa Indonesia telah banyak mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki pelaksanaan pembangunan yang selama ini dilakukan oleh orde baru. Namun, pada kenyataannya masih terdapat kesenjangan antar masyarakat dengan tingkat kemiskinan semakin tinggi dan pendapatan perkapitan yang masih rendah (Purwana, 2013). Pendapatan perkapita secara sederhana memberikan gambaran berapa nilai ekonomi yang diberikan Individu pada periode tertentu. Secara

garis besar model pembangunan dalam Islam terbagi dalam 2 pendekatan, pendekatan tersebut mengacu pada tokoh muslim. Model pembangunan Ibnu Khaldun dan model pembangunan As-Syatibi. Model pengembangan Ibnu Khaldun menekankan dari elemen ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan. Sedangkan model pembangunan *As-Syatibi* menonjolkan model pembangunan komposisi tujuan pembangunan yang harus dicapai.

Implementasi program pengentasan kemiskinan dalam RPJMD tahun 2017-2022 merupakan salah satu skala prioritas pembangunan kebijakan alokasi anggaran penanganan kemiskinan. Adapun wujud implementasi pengentasan kemiskinan dalam berbagai program, yakni Program Indonesia Pintar, Kartu Ambon Pintar, Program Keluarga Harapan, Bantuan Pangan Non Tunai, Bantuan Sosial tunai, Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dan Alokasi Dana Desa, dan Bantuan Sembako. Dana desa adalah anggaran yang berasal dari APBN untuk diperuntukan dan disalurkan dalam mengurangi adanya kesenjangan antar desa dan perkotaan di wilayah Kota Ambon (Wattimena et al., 2018).

Prioritas pembangunan di kota Ambon pada dasarnya diarahkan pada peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan sesuai dengan nilai-nilai budaya kearifan lokal. Kehidupan masyarakat Kota Ambon yang meningkat menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan dalam pembangunan dengan keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh pemerintah. Pola pembangunan dihadapkan dengan dua pilihan yakni kemajuan atau keadilan yang akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan di kota Ambon.

Kota Ambon adalah salah satu wilayah dengan sebaran penduduk yang cukup tinggi serta juga mengalami tidak meratanya persebaran dalam percepatan pembangunan antar wilayahnya. Pembangunan yang dilakukan di wilayah bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat, namun juga untuk mengejar ketertinggalan pertumbuhan ekonomi dibandingkan dengan wilayah lain (Tipka, 2014).

Pembangunan di Kota Ambon belum mencapai tujuan seperti program pengentasan kemiskinan yang belum optimal. Berdasarkan Data BPS Kota Ambon angka kemiskinan yang meningkat setiap tahun, maka program pengentasan kemiskinan harus dapat dicapai sesuai dengan program prioritas yang direncanakan (BPS Kota Ambon, 2023). Potensi umat islam di kota Ambon seperti zakat yang mencapai 88, 97 persen dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Ambon (Ambon.go.id, 2023). Implikasi

kebijakan pembangunan di kota Ambon diharapkan dapat memaksimalkan sarana dan prasarana yang memadai seperti Pelabuhan bongkar muat dan bandara agar menjaga kestabilan ekonomi (Palilu, 2018).

Permasalahan pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur saat ini belum memadai sehingga tingkat pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) pun belum meingkat sebagaimana yang diharapkan. Kondisi ini berdampak pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur yang mempengaruhi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di kota Ambon. Sehingga akses perekonomian mengalami kendala dan pembangunan tidak dapat maksimal.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Islam dalam pembangunan masyarakat di Kota Ambon, Provinsi Maluku. Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana Islam berkontribusi dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan infrastruktur di Kota Ambon. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam implementasi peran Islam dalam pembangunan masyarakat di Kota Ambon, dan mencari solusi-solusi yang dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga Islam dalam program-program pembangunan. Pada pengelolaan dan pola manajemen pembangunan di kota Ambon, terdapat skala prioritas yang mengacu pada kondisi fisik dan psikis masyarakat untuk siap melaksanakan pembangunan (Haji, 2022).

Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah dan lembaga-lembaga Islam dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi program-program pembangunan di Kota Ambon. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat menjadi sumber referensi bagi peneliti dan akademisi yang tertarik untuk melakukan penelitian serupa di wilayah lain dengan konteks yang serupa.

Metode

Metode penelitian adalah serangkaian teknik dan langkah-langkah yang dilakukan untuk mencapai tujuan dari penelitian yang dilakukan. Dalam penelitian ini, metode yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Menurut (Gunawan, 2013) penelitian kualitatif adalah penelitian yang digunakan untuk melakukan eksplorasi dengan menghimpun dari berbagai sumber untuk diinterpretasikan berdasarkan formula penelitian (Wahyudin Darmalaksana, 2020). Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini ingin mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai peran Islam dalam pembangunan masyarakat di Kota Ambon. Sedangkan metode studi kasus dipilih karena

penelitian ini fokus pada satu kasus yang spesifik, yaitu Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penentuan lokasi penelitian berdasarkan tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini, lokasi yang dipilih adalah Kota Ambon sebagai ibukota Provinsi Maluku karena memiliki keanekaragaman budaya dan agama. Selain itu, mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga dapat dikaji secara detail mengenai peran Islam dalam pembangunan masyarakat disana.
2. Pengumpulan data penelitian yang diperoleh dari sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari wawancara mendalam dengan tokoh masyarakat Islam, pemerintah, serta pengurus lembaga Islam di Kota Ambon. Sumber sekunder diperoleh dari dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian, seperti laporan kegiatan lembaga-lembaga Islam, dokumen kebijakan pembangunan masyarakat, serta data statistik yang terkait dengan pembangunan masyarakat di Kota Ambon.
3. Analisis data yang diperoleh dari wawancara dan dokumen dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, seperti content analysis dan thematic analysis. Teknik ini digunakan untuk mengidentifikasi pola-pola atau tema-tema yang muncul dari data, serta untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh.
4. Validasi data dilakukan dengan cara membandingkan data dari sumber yang berbeda, yaitu data primer dan data sekunder. Selain itu, data juga diverifikasi dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan data dari berbagai sumber yang berbeda.
5. Interpretasi data hasil analisis diinterpretasikan dengan menggunakan teknik interpretasi kualitatif, yaitu dengan memberikan penjelasan terhadap data yang telah diperoleh. Interpretasi ini dilakukan dengan cara membandingkan data dengan teori-teori yang relevan, serta dengan memperhatikan konteks sosial dan budaya di Kota Ambon (Riant Nugroho, 2013).

Selain itu, peneliti juga akan mengumpulkan dokumen dan arsip yang relevan dengan penelitian, seperti laporan kegiatan lembaga-lembaga Islam, dokumen kebijakan pembangunan masyarakat, serta data statistik yang terkait dengan pembangunan masyarakat di Kota Ambon

Hasil dan Pembahasan

Sejarah Kota Ambon

Asal mula berdiri kota Ambon terjadi pada tahun 1575 yang diawali dengan pembangunan benteng Portugis pada wilayah kota Laha atau Ferangi, kelompok – kelompok masyarakat yang dikenal dengan Soa Ema, Soa Kilang, Soa Silale, Hative, Urimessing. Kelompok masyarakat tersebut yang menjadi asal mula terbentuknya kota Ambon. Kemudian perkembangan kelompok-kelompok ini berkembang menjadi masyarakat Ginekologis teritorial. Sehingga pada tahun 1575 ditetapkan sebagai hari lahirnya kota Ambon. Momentum ini didasarkan pada era pemerintahan Kolonial yang memberikan hak kepada masyarakat Ambon untuk memainkan peranannya di dalam pemerintahan yang diakibatkan kekalahan bangsa kolonial diperpolitikan pemerintahan Ambon (Ambon.go.id, 2023b).

Menurut masyarakat setempat istilah Ambon berasal dari kata *ombong* yang merupakan bentukan lokal kata *embun*. Adanya puncak-puncak gunung di pulau Ambon yang selalu ditutupi oleh embun yang tebal. Kemudian juga istilah *laba* yang menjadi terbentuknya bakal kota yang diartikan sebagai pelabuhan (STEKOM, 2022). Istilah Ambon maupun suku Ambon dalam perkembangannya pada abad ke 20 mengacu kepada penduduk yang bermukim di Maluku Tengah, meskipun pada mulanya hanya digunakan bagi penduduk Kota Ambon dengan budaya *mestiço* atau percampuran sebuah kebudayaan yang satu dengan yang lain, memiliki warna dan sifat yang berbeda.

Penetapan berdirinya kota Ambon berawal dari inisiatif dan gagasan Walikota Madya kepala daerah tingkat II Ambon Letnan Kolonel Laut Matheos H. Manuputty dengan mengadakan sebuah seminar yang dihadiri dua ratus orang yang terdiri dari unsur akademis, tokoh masyarakat, tokoh adat, serta aparat pemerintah kota Ambon dan provinsi Maluku. Pembentukan panitia seminar dimulai dengan dikeluarkan surat keputusan Walikota kepala daerah tingkat II pada tanggal 10 Juli 1972 pada tanggal 26 Oktober 1972 bersama dengan pimpinan fakultas keguruan Universitas Pattimura yang dituangkan dalam Surat Keputusan Dekan Fakultas Keguruan Universitas Pattimura tertanggal 1 November 1972 Nomor 4/1972 Tentang Pembentukan panitia Seminar Sejarah Kota Ambon (Ambon.go.id, 2023).

Kegiatan seminar ini dilaksanakan pada tanggal 14 November sampai 17 November 1972. Maka diputuskan tanggal 7 September tahun 1575 sebagai hari jadi Kota Ambon yang berasal dari sebuah peristiwa sejarah kekalahan politik penjajahan kolonial yang diberikan kepada warga Ambon untuk menentukan pemerintahannya sendiri.

Gambaran Umum Kondisi Masyarakat, dan Karakteristik

a. Kondisi Ekonomi

Pertumbuhan penduduk kota Ambon tercatat sebagai pertumbuhan penduduk tertinggi selama tahun 2014 -2018 sebesar 3,70% dari wilayah kabupaten lainnya di Provinsi Maluku. Wilayah kota Ambon yang dikelilingi oleh lautan sehingga mata pencaharian sebagian penduduk menjadi nelayan. Ketersedian perikanan laut yang melimpah menjadikan nelayan sebagai dominan mata pencaharian. Salah satu perikanan yang mendominasi hasil tangkapan nelayan adalah Ikan Pelagis yakni jenis Ikan cakalang dan Tuna. Menurut data BPS Kota Ambon potensi hasil tangkapan ikan pada tahun 2012 untuk ikan Cakalang 6.452 ton dan ikan Tuna 2.106 ton yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi untuk nelayan pesisir kota Ambon sehingga dapat diekspor dalam bentuk segar atau olahan ke berbagai negara.

Kota Ambon yang dikeliling oleh lautan juga memiliki hasil pertanian yang berkontribusi dalam proses produksi tanaman sebesar 1.169 ton. Tanaman perkebunan adalah penghasil tanaman utama yang dibudidayakan oleh para petani sebagai salah komoditas penghasil masyarakat Ambon. Hasil komoditas utama bagi masyarakat Ambon adalah Cengkeh, Pala, dan Kelapa memiliki nilai ekonomis yang sangat tinggi bagi perekonomian masyarakat sekitar. Ketiga komoditas ini memiliki peranan penting sebagai bahan baku utama produk industri. Cengkeh dan palah adalah rempah-rempah yang memiliki nilai jual tinggi sebagai bahan campuran makanan, minuman, rokok, dan kosmetik. Terutama di negara-negara Eropa sangat dinikmati sebagai campuran minuman untuk penghangat badan akibat dinginnya cuaca. Luas wilayah perkebunan di Kota Ambon 23111,7 hektar dengan jumlah 3.558 petani serta jumlah produksi 1.169 ton merupakan hasil perkebunan yang menempati kedua terendah di Provinsi Maluku. Walaupun demikian jumlah petani di kota Ambon lebih banyak dibandingkan dengan petani di kabupaten Seram Bagian Barat yang memiliki luas perkebunan empat kali lebih banyak dibandingkan petani di kabupaten Seram Bagian Barat.

b. Kondisi Sosial Masyarakat

Kondisi sosial kota Ambon terdiri dari beberapa suku, etnis, dan budaya yang multikultural. Salau satu suku yang mendiami kota Ambon adalah suku Ambon yang terbesar di provinsi Maluku. Penyebarannya yakni berada di wilayah Ambon, Saparua, Seram barat, Nusalaut, dan Haruku. Pemeluk agama mayoritas di kota Ambon beragama Kristen Protestan sebanyak 49,2 %, sedangkan islam 44,3%, Katholik 6,3%, Hindu dan Budha 0,04%. Para pendatang banyak memegang peranan beberapa sektor-sektor

perekonomian informal yang cenderung dihindari masyarakat asli. sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketegangan antara penduduk pendatang yang mayoritas beragama islam dengan penduduk asli beragama Nasrani. Sistem kekerabatan pada masyarakat Ambon sangat kuat dalam berbagai bidang sosial, ekonomi, dan politik. Keterkaitan ini dibuktikan dengan bentuk marga atau fam dalam suatu kepemimpinan di pemerintahan yang mana apabila ada pejabat asli daerah yang dilantik maka pejabat dibawahnya cenderung digantikan dengan orang yang memiliki kekerabatan dengan pejabat tersebut.

Jika dilihat dari aspek kondisi sosial budaya dan geografis terdapat kemajemukan yang terjadi di kota Ambon, pertama, secara vertikal yang tergambar pada struktur masyarakat yang memiliki perbedaan lapisan dan strata sosial antara lapisan atas dan lapisan bawah. Kedua, adanya kemajemukan horisontal yang tergambar dari adanya kesatuan-kesatuan sosial (Pettalongi, 2013). Sehingga kondisi ini terkadang dapat menimbulkan konflik akibat isu SARA (Suku, Agama, Ras, Antar Golongan) yang menegangkan serta meresahkan masyarakat dan agama sering kali menjadi isu yang sensitif asal usul konflik seperti yang pernah terjadi pada tahun 1999 di kota Ambon.

Dinamika Politik

a. Partai politik yang mendominasi

Konflik Ambon yang terjadi pada tahun 1999 menimbulkan segregasi atau keterpisahan pemukiman penduduk secara agama dan berdampak pada dimensi sosial, budaya, ekonomi dan kehidupan politik seperti pilkada yang cenderung berkumpul dengan kelompok agama yang sama. Pola perpolitikan kota Ambon ketika runtuhnya orde baru dikuasai oleh partai yang berhaluan sekuler dengan menguasai pemilu dan pemilihan wali kota Ambon. Kemunculan partai PDI Perjuangan adalah salah satu partai besar yang memenangkan pemilihan di kota Ambon memiliki pengaruh besar dan memiliki hubungan kuat dengan komunitas Kristen di wilayah Ambon. Beberapa pengurus dan anggota partai adalah misionaris Gereja Protestan Maluku (GPM) di kota Ambon. Kemudian komposisi anggota yang menempati di kursi DPRD kota Ambon masih didominasi partai-partai sekuler. Partai PDI Perjuangan dan Partai Golkar menjadi partai yang mendominasi dalam setiap pemilihan umum.

b. Perolehan pemilu pasca reformasi 1998

Pemilihan Gubernur Maluku juga mewarnai hubungan perpolitikan di kota Ambon. Konfigurasi penentuan bakal calon gubernur masih kental dengan pertimbangan kelompok Islam dan Kristen untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Hampir dalam setiap pemilihan gubernur setiap pasangan calon selalu mencalonkan kandidat gubernur yang berasal dari komunitas Islam dan wakil gubernur dari komunitas

Kristen atau begitu sebaliknya. Pola perpolitikan seperti ini menjadi pertimbangan untuk memberikan perimbangan kekuasaan antara kedua komunitas menjadi bagian integral dalam politik perdamaian di Provinsi Maluku.

Dinamika Tata Pemerintahan

a. Partai politik yang mendominasi

Konflik Ambon yang terjadi pada tahun 1999 menimbulkan segregasi atau keterpisahan pemukiman penduduk secara agama dan berdampak pada dimensi sosial, budaya, ekonomi dan kehidupan politik seperti pilkada yang cenderung berkumpul dengan kelompok agama yang sama. Pola perpolitikan kota Ambon ketika runtuhnya orde baru dikuasai oleh partai yang berhaluan sekuler dengan menguasai pemilu dan pemilihan wali kota Ambon. Kemunculan partai PDI Perjuangan adalah salah satu partai besar yang memenangkan pemilihan di kota Ambon memiliki pengaruh besar dan memiliki hubungan kuat dengan komunitas Kristen di wilayah Ambon. Beberapa pengurus dan anggota partai adalah misionaris Gereja Protestan Maluku (GPM) di kota Ambon. Kemudian komposisi anggota yang menempati di kursi DPRD kota Ambon masih didominasi partai-partai sekuler. Partai PDI Perjuangan dan Partai Golkar menjadi partai yang mendominasi dalam setiap pemilihan umum.

b. Perolehan pemilu pasca reformasi 1998

Pemilihan Gubernur Maluku juga mewarnai hubungan perpolitikan di kota Ambon. Konfigurasi penentuan bakal calon gubernur masih kental dengan pertimbangan kelompok Islam dan Kristen untuk menjadi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Hampir dalam setiap pemilihan gubernur setiap pasangan calon selalu mencalonkan kandidat gubernur yang berasal dari komunitas Islam dan wakil gubernur dari komunitas Kristen atau begitu sebaliknya. Pola perpolitikan seperti ini menjadi pertimbangan untuk memberikan perimbangan kekuasaan antara kedua komunitas menjadi bagian integral dalam politik perdamaian di Provinsi Maluku.

c. Latar Belakang Keagamaan Pemimpin

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota di Kota Ambon tidak terlepas dengan segregasi keagamaan pasca konflik agama tahun 1999 yang pola masyarakat terbagi menjadi dua bagian, yakni kelompok Islam dan Kristen. Demikian juga dengan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang memiliki latar belakang yang berbeda. Pada pilkada yang terjadi di kota Ambon biasanya calon walikota dan wakil walikota berasal dari latar belakang yang berbeda, apabila calon walikota beragama Islam maka calon wakil walikota beragama Kristen. Begitu pula sebaliknya apabila calon walikota yang beragama Kristen maka calon wakil walikota harus beragama Islam. Segregasi politik agama yang terjadi di kota Ambon

diakibatkan dengan konflik Ambon yang terjadi pada masa lalu, sehingga sistem pemerintahan di kota Ambon masih bersinggungan dengan keagamaan yang sangat kuat.

d. Dinamika Kebijakan Publik dan Perekonomian

Provinsi Maluku merupakan salah satu provinsi yang memiliki gugusan kepulauan dan memiliki wilayah laut yang sangat luas. Wilayah Maluku hanya memiliki 4 pulau besar dan 1.336 pulau yang menjadi bagian pulau kecil. Provinsi Maluku memiliki potensi sumber daya alam yang sangat tinggi dan menjadi salah satu pusat lumbung ikan nasional. Pemanfaatan sumber daya alam ikan di provinsi Maluku sebesar 4.669.390 ton per tahun (37,2%) dari total perikanan nasional.

Potensi sumber daya alam ini sangat mempengaruhi tingginya kapasitas perekonomian di Provinsi Maluku. Selain potensi perikanan Maluku juga memiliki 3 komoditas perkebunan unggulan yakni cengkeh, pala dan kelapa yang tersebar di 11 kabupaten/ Kota Provinsi Maluku. Luas areal kelapa secara keseluruhan sebesar 113.393,04 Ha yang mana Kabupaten Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar, Maluku Tengah dan Seram Bagian Timur. Untuk komoditas cengkeh Maluku memiliki areal tanaman cengkeh sebesar 44.162,17 Ha dan produksi 21.235.86 ton dengan sebaran di 9 Kabupaten/Kota di Maluku, kecuali Kepulauan Tanimbar dan Kepulauan Aru. Sementara komoditas pala memiliki luas 32.456,33 Ha dan produksi sebesar 5.325,24 ton. Persebaran pala terbesar terdapat di Kabupaten Seram Bagian Timur dan Maluku Tengah. Pertumbuhan tinggi di beberapa daerah pada Provinsi Maluku diperoleh dari beberapa sektor, yakni Pertanian, kehutanan, dan perikanan. Kemudian sektor yang memberikan kontribusi adalah bidang administrasi, pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial yang baik bagi masyarakat. Beberapa daerah di provinsi

Maluku memiliki kapasitas ekonomi yang tergolong rendah yakni penghasilan sumber daya alam yang rendah dan sumber daya manusia yang tidak berkompetensi sehingga menyebabkan pengelolaan potensi daerah tidak maksimal. Kemudian secara geografis letak kabupaten di provinsi yang berada pada gugusan kepulauan yang menyulitkan akses sebagai komoditas, penyaluran pun harus melalui jalur laut dan menyesuaikan dengan tingginya gelombang laut yang menyebabkan pasokan komoditas ekonomi terhambat.

Dasar Pembangunan Sosial Kota Ambon

Pembangunan di kota Ambon pada dasarnya diarahkan pada peningkatan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan sesuai dengan nilai-nilai budaya kearifan lokal. Kehidupan masyarakat Kota Ambon yang meningkat menimbulkan berbagai dampak dan permasalahan dalam pembangunan dengan keterbatasan anggaran yang

dimiliki oleh pemerintah. Pola pembangunan dihadapkan dengan dua pilihan yakni kemajuan atau keadilan yang akan menjadi pijakan dalam menentukan arah pembangunan di kota Ambon. Kota Ambon terletak di pulau Ambon yang dikelilingi lautan sehingga merupakan daerah maritim yang memiliki hasil laut yang melimpah.

Visi pembangunan Kota Ambon pada lima tahun mendatang dengan mengacu pada penjabaran visi Walikota dan Wakil Walikota Ambon dengan visi Kota Ambon Tahun 2017-2022 adalah Ambon harmonis, Sejahtera dan religius dengan memiliki makna bahwa, visi Kota Ambon yang harmonis selaras dengan visi pembangunan nasional berkepribadian berdasarkan gotong royong dan visi pembangunan Maluku yang rukun, dan damai pada dasarnya bertujuan meningkatkan keselarasan, keserasian, disiplin, tolong menolong, saling memaafkan dan saling menghargai antar masyarakat yang memiliki kepribadian Indonesia dan bercirikan gotong royong. Visi Ambon sejahtera memiliki keselarasan dengan visi nasional mandiri dan visi Provinsi Maluku Sejahtera yang dapat memberdayakan potensi lokal dan memiliki ketahanan terhadap dinamika yang berlangsung. Visi religius berkaitan dengan visi nasional berkepribadian berdasarkan gotong royong dan visi Provinsi Maluku yakni religius dengan sikap dan perilaku masyarakat yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama atau kepercayaan yang dianut, toleran kepada pelaksanaan ibadah agama atau kepercayaan yang lain dan hidup rukun dengan pemeluk agama lain yang terbangun dalam kerangka kearifan budaya lokal di masyarakat.

Misi yang dirumuskan untuk pembangunan Kota Ambon lima tahun mendatang terdiri dari 4 aspek yakni, memperkuat dan mempererat harmonisasi sosial, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, memberdayakan ekonomi keluarga dan masyarakat menuju kemandirian yang kreatif berbasis sumberdaya alam yang tersedia, dan meningkatkan nilai-nilai spiritual masyarakat.

Peran Islam dalam Pembangunan Sosial di Kota Ambon

1. Pandangan Islam Tentang Pentingnya Aspek Pembangunan Sosial-Masyarakat

Pembangunan dapat didefinisikan sebagai kondisi peningkatan produktivitas melalui pendapatan perkapita. Pendapatan perkapita secara sederhana memberikan gambaran berapa nilai ekonomi yang diberikan Individu pada periode tertentu. Secara garis besar model pembangunan dalam Islam terbagi dalam 2 pendekatan, pendekatan tersebut mengacu pada tokoh muslim, salah satunya Ibnu Khaldun. Model pembangunan Ibnu Khaldun dan model pembangunan As-Syatibi. Model pengembangan Ibnu Khaldun menekankan dari elemen ekonomi dalam mencapai tujuan pembangunan. Sedangkan model pembangunan *As-Syatibi* menonjolkan model pembangunan komposisi dengan

tujuan pembangunan yang harus dicapai. Model pembangunan dalam islam yang dicetuskan kedua tokoh tersebut dapat menjadi gambaran pondasi pembangunan saat ini. Contohnya model pembangunan yang dicetuskan oleh Ibnu Khaldun yang sangat berjasa bagi pembangunan ekonomi umat islam yang basis keilmuannya tidak hanya terbentuk secara teoritis, namun juga berdasarkan pengalamannya yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat.

Konsep pembangunan yang dikonsepsi Ibnu Khaldun sangat kontekstual dikarenakan model pembangunan yang dinamis dan lintas disiplin yang berusaha menjelaskan bagaimana sebuah pembangunan, ekonomi, dan peradapan dapat mengalami naik turun serta sekaligus dapat menjawab beberapa masalah krusial terhadap fenomena-fenomena yang terjadi dalam sistem kehidupan sosial. Pembangunan dalam islam memiliki 4 tujuan ekonomi, yakni menjamin kebutuhan dasar manusia, meningkatkan kapabilitas dan martabat manusia, menjamin keberlangsungan kehidupan manusia dalam jangka panjang serta menumbuhkan dan menjamin spiritualis.

a. Umat islam di Kota Ambon

Ambon merupakan salah satu kota yang Pemeluk agama mayoritasnya beragama Kristen Protestan sebanyak 49,2 %, sedangkan islam 44,3%, Katholik 6,3%, Hindu dan Budha 0,04%. Para pendatang banyak memegang peranan beberapa sektor-sektor perekonomian informal yang cenderung dihindari masyarakat asli, sehingga menimbulkan kesenjangan dan ketegangan antara penduduk pendatang yang mayoritas beragama islam dengan penduduk asli beragama Nasrani.

Hubungan antar umat beragama di Kota Ambon pasca konflik keagamaan tahun 1999 mengalami segregasi antara penduduk yang beragama Islam dan Kristen. Konflik Ambon terjadi pada tanggal 19 Januari 1999 ketika umat islam sedang melaksanakan sholat idul fitri yang diserang oleh kelompok yang dikonotasikan sebagai kelompok Kristen secara acak. Peristiwa konflik tersebut berkembang dengan cepat dan berkembang menjadi konflik agama. Eskalasi konflik menjadi tidak terkendali dan berkembang di seluruh kota Ambon. Penyelesaian konflik di Kota Ambon dilakukan dengan pengerahan aparat keamanan TNI dan Polri untuk melakukan pelepasan pertikaian antara warga yang berkonflik. Pengerahan TNI dan Polri pada mulanya berasal dari satuan lokal yang bermarkas di Kota Ambon. Namun eskalasi konflik masih belum bisa teratasi, bahkan aparat keamanan TNI dan Polri yang dikerahkan kurang adil dalam menjalankan tugasnya untuk menangani konflik yang terjadi. Beberapa opini yang tersebar mengindikasikan terjadinya perpecahan anggota aparat Polri menjadi dua bagian, yakni Polisi Islam dan

Polisi Kristen yang terpisah dan menyulitkan pengamanan konflik antara orang Islam dan Kristen.

a) Ketersediaan Rumah Ibadah Masjid/Mushala

Berdasarkan data Kementerian Agama Kota Ambon tempat peribadatan umat islam yang terdata sebanyak 232 Masjid/Mushala. Penyebaran Masjid/Mushala terdapat di 4 kecamatan, yakni kecamatan Nusaniwe, Sirimau, Teluk Ambon Baguala, dan Teluk Ambon.

Kecamatan	Masjid	Mushola
Nusaniwe	13	20
Sirimau	94	25
Teluk Ambon Baguala	29	10
Teluk Ambon	39	2

Tabel 1. Jumlah Masjid dan Mushala

Sumber: Kementerian Agama Kota Ambon Tahun 2020

b) Ketersediaan Akses Pendidikan Islam

Akses Pendidikan merupakan salah satu pondasi pembangunan di kota Ambon. Sehingga berdampak kepada kualitas sumber daya manusia. Kualitas pendidikan baik dan diimbangi dengan kualitas SDM yang mumpuni maka proses pembangunan di Kota Ambon akan dapat berjalan dengan baik. Pemerataan akses pendidikan di kota Ambon belum maksimal, hal ini dikarenakan jumlah sarana dan prasarana yang tersedia serta kualitas pendidikan tidak seimbang (2017-2022, 2022). Hal ini juga didukung berdasarkan data Kemenag RI jumlah persebaran lembaga pendidikan yang tidak seimbang dimana jumlah Madrasah Ibtidaiyah (MI) lebih mendominasi ujdan Madrasah Aliyah (MA) yang lebih rendah (Agama, 2020)

Jenis Lembaga Pendidikan	Jumlah
Raudhatul Athfal	84
Madrasah Ibtidaiyah	143
Madrasah Tsanawiyah	139
Madrasah Aliyah	72
Pondok Pesantren	16

Tabel 2. Jumlah Lembaga Pendidikan Islam

Sumber: <http://simpenais.kemenag.go.id>

c) Ketersediaan Fasilitas Kesehatan

Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Ambon terdapat 456 fasilitas kesehatan yang terdapat dalam 5 kecamatan dan Berbagai fasilitas Kesehatan yang tersedia yakni rumah sakit, Puskesmas, Poliklinik , Praktik Dokter, Rumah Bersalin, Poskesdek, dan Apotek yakni: (BPS Kota Ambon, 2023)

Kecamatan	Rumah Sakit	Puskesmas	Poliklinik	Praktik Dokter	Rumah Bersalin	Poskesdes	Apotek	Jumlah
Nusaniwe	2	18	4	10	3	2	12	51
Sirimau	5	12	11	38	2	0	45	113
Leitimur Selatan	0	10	0	0	0	1	0	11
Teluk Ambon Baguala	4	10	4	7	5	7	8	45
Teluk Ambon	2	12	4	4	3	1	7	33

Tabel 3. Jumlah Fasilitas Kesehatan
Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Ambon, Tahun 2020

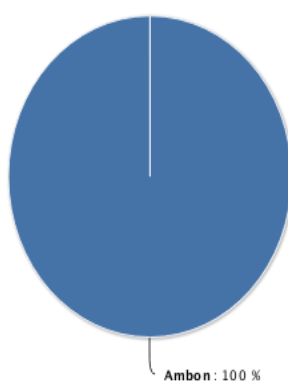
d) Lembaga Zakat

Lembaga zakat di Kota Ambon hanya terdapat Badan Amil Zakat Provinsi Maluku yang dikelola oleh pemerintah Provinsi Maluku dan Badan Amil Zakat Kota Ambon, serta selanjutnya adalah unit pengumpulan zakat (UPZ) yang terdapat pada Kantor Instansi pemerintah di Kota Ambon di Bawah koordinasi Badan Amil Zakat Kota Ambon. Hasil pengumpulan zakat di UPZ Pemerintah Kota Ambon pada tahun 2022 sebesar Rp22.954.252 atau 88,97 persen dari target pengumpulan zakat Rp25.798.696.

e) Majelis Taklim

Berdasarkan data Kementerian Agama Republik Indonesia Jumlah majelis Taklim yang berada di Kota Ambon yang terdiri 1 majelis taklim.

Jumlah Majelis Taklim Per Kota/Kabupaten



Sumber: <http://simpenais.kemenag.go.id/majelis>

Highcharts.com

Sinkronisasi Potensi Umat Islam yang Sedang di Prioritaskan

Potensi umat islam sangat mendukung dalam pembangunan di Kota Ambon, seperti halnya ekonomi untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan ekonomi sangat bergantung bagi manusia untuk dapat bertahan hidup. Kebutuhan hidup

yang diidentikan dengan kebutuhan pokok setiap individu dalam pemenuhannya. Apabila setiap individu tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya maka dapat dikategorikan sebagai penduduk miskin atau fakir. Berdasarkan data BPS jumlah kemiskinan di kota Ambon mengalami peningkatan selama 5 tahun terakhir. Potensi zakat yang mencapai 88,97 persen di kota Ambon dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Ambon.

Program pemerintah dalam mendukung potensi umat islam di Kota Ambon dapat dilakukan dengan mengoptimalkan potensi zakat di Kota Ambon dengan berkolaborasi Badan Amil Zakat dalam bentuk bantuan zakat produktif seperti modal usaha dan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang terdampak kemiskinan, sehingga peran *mustahiq* dapat menjadi *muzzaki* untuk memberikan zakat kepada yang mengalami kesulitan ekonomi.

Kontribusi Islam dalam pembangunan masyarakat di Kota Ambon

Islam dan pembangunan infrastruktur di Kota Ambon sangat berpengaruh bagi perkembangan masyarakat muslim di kota Ambon. Salah satunya adalah masjid yang tidak hanya menjadi sekedar tempat ibadah dan penyucian diri, namun juga memiliki fungsi sosial. Masjid memiliki fungsi sebagai kegiatan pendidikan, keagamaan, serta dapat menjadi institusi politik dan pemerintahan. Fungsi masjid sangat luas dalam pembangunan masyarakat dan segala permasalahan di masyarakat dapat diselesaikan di masjid (Khozin & Lauselang, 2021).

Masjid adalah tempat yang baik bagi pembangunan masyarakat. Dengan menjadikan masjid sebagai pusat dari kegiatan masyarakat dan keberadaannya sangat urgen. Pemanfaatan masjid akan terasa meningkat jika didukung oleh pemuda masjid yang kreatif dan penuh semangat untuk menghidupkan masjid. Kemudian pembangunan masjid tidak terlepas dari peran negara yang utama berkaitan dengan sumber pendanaan yang memerlukan dana yang besar. Salah satunya adalah pembangunan masjid yang dibangun pada orde baru dengan prakarsa presiden H. M Soeharto dengan nama Masjid Amalbakti Muslim Pancasila (YAMP) yang dibangun pada 999 lokasi di seluruh Indonesia, salah satunya di Kota Ambon (Khozin & Lauselang, 2021).

Pembangunan masjid di Kota Ambon terdapat pada 4 lokasi strategis yang terletak di Kampus Universitas Pattimura, IAIN Ambon, Kampung Tihu, dan BTN Wayame. Banyak kegiatan yang sering dilakukan di Masjid Amalbakti Muslim Pancasila, mulai dari Dosen, Mahasiswa, dan juga masyarakat umum turut terlibat dalam penggunaan masjid sebagai pembangunan di Kota Ambon. Sehingga masjid tidak hanya dijadikan sebagai

pusat kegiatan dakwah dan keimanan. Namun dapat diperuntukan bagi pembangunan kegiatan di masyarakat.

Pemanfaatan masjid adalah salah satu bentuk implementasi Islam dalam pembangunan bagi masyarakat di Kota Ambon yang menjadi wadah atau lembaga kemasyarakatan untuk memberikan ruang bagi pengembangan sosial kemasyarakatan. Sebagai bentuk pengembangan dapat berpijak dalam mencapai cita-cita yang tepat, yaitu tempat keagamaan Islam yang dapat memberikan pembinaan berbagai keterampilan masyarakat untuk dapat mendidik dirinya sendiri agar bersedia dalam kontribusi pembangunan.

Kendala dalam Implementasi Peran Islam Dalam Pembangunan Masyarakat Kota Ambon

Konflik keagamaan yang terjadi pada masa lalu mengakibatkannya terjadinya segregasi wilayah pemukiman penduduk berdasarkan agama. Akibat konflik, masyarakat lebih memilih untuk tinggal di pemukiman yang lebih aman. Penyebab konflik yang dipicu oleh pertikaian sopir angkot dan kernet di terminal Batumerah telah menimbulkan korban jiwa dan kerusakan fasilitas publik dan gedung-gedung pemerintah.

Akibat segregasi wilayah proses pembangunan sempat mengalami berbagai hambatan. Namun, setelah adanya perdamaian perjanjian Malino II perlahan masyarakat mulai menerima. Walaupun situasi keamanan belum sepenuhnya kondusif dan membutuhkan waktu 6 bulan untuk melakukan pemulihan (Kemenag, 2005). Upaya pembangunan pasca konflik dapat dilakukan dalam mengarasi dampak segregasi dengan pendekatan kesejahteraan rakyat untuk mengedepankan upaya harmonisasi interaksi sosial antar kedua kelompok yang bertikai dan berperang (Mohammad Hasan Ansori, 2014). Para pemuka agama yang tergabung dalam forum kerukunan umat beragama (FKUB) dilibatkan untuk menjadi pilar pembangunan masyarakat setelah konflik dan juga masyarakat dilakukan pembauran dengan melakukan perbaikan ekonomi, sosial, dan keagamaan sebagai upaya untuk mempercepat proses pemulihan dan perdamaian pasca konflik yang terjadi.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa Islam memiliki peran penting dalam pembangunan masyarakat Kota Ambon, terutama dalam hal pendidikan dan pemberdayaan ekonomi. Lembaga-lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan pesantren telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Ambon. Di samping itu, Islam juga memberikan kontribusi dalam pembangunan infrastruktur dan fasilitas umum. Lembaga-lembaga Islam seperti yayasan sosial dan amal

juga aktif dalam memberikan pelayanan sosial dan kemanusiaan kepada masyarakat Ambon, terutama dalam situasi darurat dan bencana alam.

Namun, masih terdapat kendala-kendala dalam implementasi peran Islam dalam pembangunan masyarakat Ambon. Salah satunya adalah masih minimnya koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga Islam dalam pelaksanaan program-program pembangunan. Selain itu, masih terdapat perbedaan pandangan dan pemahaman antara pihak-pihak yang terlibat dalam pembangunan masyarakat di Kota Ambon. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya untuk meningkatkan koordinasi dan sinergi antara pemerintah dan lembaga-lembaga Islam dalam program-program pembangunan di Kota Ambon. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog dan kerjasama yang intensif antara pihak-pihak yang terlibat, serta dengan mengedepankan prinsip-prinsip keadilan dan kemanusiaan.

Pembangunan di Kota Ambon belum mencapai tujuan sebagaimana program pengentasan kemiskinan yang belum optimal. Berdasarkan Data BPS Kota Ambon angka kemiskinan yang meningkat setiap tahun, maka program pengentasan kemiskinan harus dapat dicapai sesuai dengan program prioritas yang direncanakan. Potensi umat islam di kota Ambon seperti zakat yang mencapai 88, 97 persen dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemerintah dalam pengentasan kemiskinan yang menjadi pekerjaan rumah pemerintah Kota Ambon.

Pemerintah Kota Ambon dapat mengoptimalkan potensi zakat dengan berkolaborasi dengan Badan Amil Zakat dalam bentuk bantuan zakat produktif seperti modal usaha dan pelatihan-pelatihan bagi masyarakat yang terdampak kemiskinan, sehingga peran *mustabiq* dapat menjadi *muzakki* untuk memberikan zakat kepada yang mengalami kesulitan ekonomi.

Referensi

- 2017-2022, R. K. A. T. (2022). *BAB IV ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS*. 1–18.
- Agama, K. (2020). *Data Lembaga Pendidikan*. <http://simpenais.kemenag.go.id>
- Ambon.go.id. (2023). *Optimalkan Zakat Aparatur, Pemkot Siapkan Perwali*. <https://ambon.go.id/optimalikan-zakat-aparatur-pemkot-siapkan-perwali/>
- Ambon.go.id. (2023). *Sejarah Ambon*. <https://ambon.go.id/sejarah-ambon/>
- BPS Kota Ambon. (2023). *Data Kemiskinan Kota Ambon*. <https://ambonkota.bps.go.id/indicator/23/30/1/kemiskinan.html>
- BPS Kota Ambon. (2023). *Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Ambon Menurut Kecamatan 2019 - 2020*. <https://ambonkota.bps.go.id/indicator/30/46/1/jumlah-fasilitas-kesehatan-kota-ambon-menurut-kecamatan.html>

- Haji, H. Bin. (2022). Peran Lembaga Adat dan Pengaruhnya Terhadap Pelaksanaan Pembangunan di desa Batu Merah Kota Ambon. *Journal of Government Science Studies*, 1(1), 09–17. <https://doi.org/10.30598/jgssvol1issue1page09-17>
- Kemenag, B. (2005). *Konflik Sosial Bernuansa Agama: Studi Kasus Kerusuhan di Ambon*. <https://balitbangdiklat.kemenag.go.id/berita/konflik-sosial-bernuansa-agama-studi-kasus-kerusuhan-di-ambon>
- Khozin, N., & Lauselang, H. (2021). Kontribusi Masjid Amalbakti Muslim Pancasila (Yamp) Dalam Pembangunan Masyarakat Muslim Di Kota Ambon. *al-Iltizam: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 6(1), 30. <https://doi.org/10.33477/alt.v6i1.1869>
- Mohammad Hasan Ansori, D. (2014). *Segregasi, Kekerasan, dan Kebijakan Rekonstruksi Pasca Konflik di Ambon*. The Habibie Center.
- Palilu, A. (2018). Jurnal Buletin Studi Ekonomi. Vol. 23 No. 2, Agustus 2018. *Jurnal Buletin Studi Ekonomi*, 23(1), 227–240.
- Pettalongi, S. S. (2013). Islam dan Pendidikan Humanis dalam Resolusi Konflik Sosial. *Cakrawala Pendidikan*, 0(2), 172–182.
- Purwana, A. E. (2013). Pembangunan Dalam Perspektif Ekonomi Islam. *Justicia Islamica*, 10(1). <https://doi.org/10.21154/justicia.v10i1.140>
- Riant Nugroho. (2013). *Metode Penelitian Kebijakan*. Pustaka Pelajar.
- STEKOM, U. (2022). *Sejarah Kota Ambon*. https://p2k.stekom.ac.id/ensiklopedia/Sejarah_Kota_Ambon
- Tipka, J. (2014). Analisis Ketimpangan Pembangunan Antara Kecamatan Di Kota Ambon. *BAREKENG: Jurnal Ilmu Matematika dan Terapan*, 8(2), 41–45. <https://doi.org/10.30598/barekengvol8iss2pp41-45>
- Wahyudin Darmalaksana. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. *UIN Sunan Gunung Djati Bandung, April*, 1–6.
- Wattimena, D. L., Damanik, I. P. N., & Kaplale, R. (2018). Analysis of Village Fund Usage for Agricultural Development in Rural Area of Ambon City. *Jurnal Agrilan*, 6(1), 1–16.